

SKRIPSI
KEKUATAN POLITIK PARTAI GOLKAR PADA PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN TANA TORAJA

Disusun dan Diajukan Oleh :

ELVIANA LEMBANG

E 111 15 017



DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KEKUATAN POLITIK PARTAI GOLKAR PADA PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN TANA TORAJA

Disusun Dan Diajukan Oleh :

Elviana Lembang
E11115017

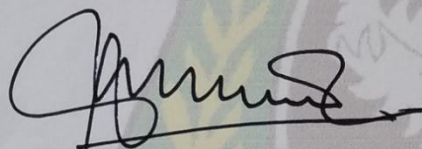
Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Yang Dibentuk Dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

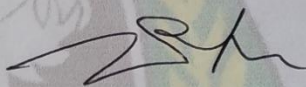
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

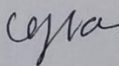
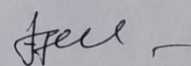
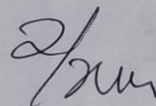


Prof. Dr. Armin, M.Si
NIP: 196511091991031008



Andi Naharuddin, S.IP, M.Si
NIP: 197311222002121001


2021



Mengetahui,

Ketua Departemen
Ilmu Politik




Drs. H. A. Yakub, M.Si, Ph.D
NIP: 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**KEKUATAN POLITIK PARTAI GOLKAR PADA PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Disusun Dan Diajukan Oleh :

Elviana Lembang

E11115017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada

Program Studi Ilmu Politik

Dapartemen Ilmu Politik

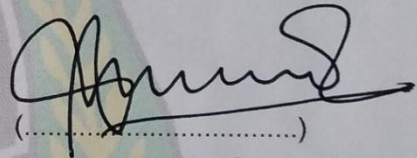
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Senin 28 Juni 2021

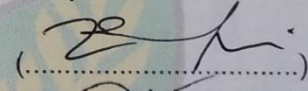
Menyetujui

Panitia Ujian

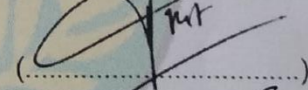
Ketua : Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si

()

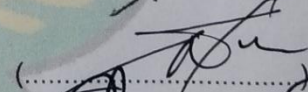
Sekretaris : Andi Naharuddin, S.IP, M.Si

()

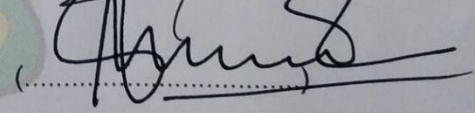
Anggota : Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si

()

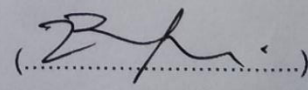
Anggota : Haryanto, S.IP, M.A

()

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si

()

Pembimbing 2 : Andi Naharuddin, S.IP, M.Si

()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Elviana Lembang
NIM : E11115017
Program Studi : Ilmu Politik
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

“Kekuatan Politik Partai Golkar Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Tana Toraja” adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Juni 2021

Yang menyatakan



Elviana Lembang
NIM : E11115017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang adalah satu, telah memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat, serta kasihNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kekuatan Politik Partai Golkar Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kabupaten Tana Toraja”**. Penyusunan skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Bapak Yakob Lembang dan Ibu Marthina Saka Arroan yang telah merawat, membesarkan, mendidik dan menyekolahkan penulis hingga perguruan tinggi. Kepada saudaraku Ebed Arroan Lembang, Emil Arroan Lembang, dan saudariku Elsyah Arroan Lembang yang telah memberikan dukungan materi, nasehat serta doa. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, perhatian, motivasi serta doanya.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku penasehat akademik (PA) sekaligus selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang

telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa berbagai pihak telah memberikan petunjuk dan bantuan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan dilingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik.
4. Bapak Dr. Suparman Abdullah, M.Si, selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Perencanaan FISIP UNHAS yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi.
5. Bapak Dr. Hasrullah, M.Si, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan FISIP UNHAS yang telah

memberikan kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan kemahasiswaan.

6. Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
7. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : (Bapak Alm. Prof. Dr. Muh, Kausar Bailusy, MA), Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, (Alm. Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag), Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus M.Si, Bapak Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Kakak Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, Kakak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Kakak Dian Ekawati, S.IP, M.Si yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan staf jurusan ilmu politik khususnya Bapak Aditya, Bapak Hamzah, dan Ibu Hasna, yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.

9. Kepada seluruh narasumber/Informan dari pihak partai Golkar Tana Toraja, tokoh adat dan tokoh masyarakat Tana Toraja serta masyarakat atas kesediannya menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada seluruh teman angkatan Delegasi 2015 program studi ilmu politik yang menemani selama proses perkuliahan. Secara khusus kepada saudari sekaligus sahabatku Astmha yang selama kuliah sampai proses skripsi selalu ada dan menemani, memberikan doa, arahan, masukan, nasehat, motivasi, kritikan serta waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada seluruh pemimpin rohani cece Chan, cece Lisa, mami Yessy, mami Eka Gusti, Amala dan Desti yang telah menjadi orang tua kedua yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan semangat, nasehat, motivasi, doa dan telah menjadi teman curhat selama penyusunan skripsi ini.
12. Kepada saudara-saudari seiman CG HOPE dan kakak-kakak Eaglekidz GMS Makassar atas dukungan semangat dan dukungan doanya selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak agar menjadikan skripsi ini lebih bermanfaat. Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Makassar, 28 Juni 2021

Yang menyatakan

Elviana Lembang
NIM : E11115017

ABSTRAK

Elviana Lembang. E 111 15 017. "Kekuatan Politik Partai Golkar Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Tana Toraja". Dibawah bimbingan Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si sebagai Pembimbing I dan Andi Naharuddin, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing II.

Latar belakang penulis melakukan penelitian ini bertitik tolak pada fenomena yang terjadi dilokasi penelitian yaitu bagaimana aktor partai Golkar dalam mempertahankan kekuatan politik pada pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini bertujuan mengetahui kekuatan politik aktor partai Golkar dari ketokohan dan modalitas aktor dalam memenangkan pemilihan legislatif 2019 sebagai partai yang meraih suara terbanyak di Kabupaten Tana Toraja.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tana Toraja yaitu kantor DPC partai Golkar. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, menggunakan teknik wawancara, penentuan informan, dokumentasi. Sedangkan dalam pembahasan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan keadaan dilapangan secara sistematis.

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai kekuatan politik partai Golkar pada pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Tana Toraja yaitu aktor politik sebagai kekuatan politik yang dilihat dari Ketokohan aktor partai Golkar yang telah berpengalaman dibidang politik, mempunyai potensi dan basis massa yang menjamin kemenangan partai Golkar. Modalitas aktor yaitu modal politik yang dimiliki aktor partai Golkar yaitu menjabat tiga periode sebagai ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja. Selain itu menjabat sebagai ketua diberbagai lembaga dan organisasi. Modal sosial partai Golkar yaitu aktor partai yang selalu berada ditengah-tengah masyarakat menjalankan berbagai program kerja sesuai dengan visi-misi partai. Modal ekonomi partai Golkar yaitu *cost politic*. *Cost politic* digunakan oleh aktor dan tim-tim Golkar untuk dana operasional, spanduk, poster, baju kampanye, bendera kampanye dan bahkan untuk membuat iklan dimedia massa atau TV.

Kata Kunci: Kekuatan Politik, Partai, Pemilihan Legislatif.

ABSTRAC

Elviana Lembang. E 111 15 017. "The Political Power of Golkar Party in the 2019 Legislative Elections in Tana Toraja Regency". Under the guidance of Prof. Dr. Armin, M.Si as Supervisor 1 and Andi Naharuddin, S.IP, M.Si as Advisor II.

The background of the authors of this study focused on the phenomenon that occurred at the research site, namely How actors and institutions golkar party in maintaining political power in the 2019 legislative elections in Tana Toraja Regency. This study aims to find out the political power of Golkar party actors from golkar party actors' office, actor modality and political power of Golkar party from golkar party network, actor network and golkar party rules in winning the 2019 legislative elections as the party that won the most votes in Tana Toraja Regency.

The research conducted is field research using qualitative approach. This research was conducted in Tana Toraja Regency, the dpc office of Golkar party. In collecting the required data, using interview techniques, informant determination, documentation. While in the discussion using descriptive methods of analysis, which is a method that describes the state of the field systematically.

The results of research conducted on the political power of golkar party in the 2019 legislative elections in Tana Toraja Regency, namely political actors as a political force seen from the character golkar party actors who have experienced in the field of politics, have the potential and mass base that guarantees the victory of golkar party. The modality of the actor is the political capital owned by golkar party actors, namely serving three periods as chairman of the Tana Toraja Regency Parliament. In addition, he served as chairman of various institutions and organizations. Golkar party's social capital is party actors who are always in the middle of the community running various work programs in accordance with the party's vision-mission. The economic capital of Golkar party is political cost. Cost politic is used by actors and Golkar teams for operational funds, banners, posters, campaign clothes, campaign flags and even to create advertisements in the mass media or TV.

Keywords: Political Power, Party, Legislative Elections.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
ABSTRAC	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Telaah Pustaka	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Konsep Kekuatan Politik	16
2.2. Partai Politik Sebagai Kekuatan Politik.....	19
2.2.1. Fungsi Partai Politik.....	25
2.2.1.1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik.....	25
2.2.1.2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik	25
2.2.1.3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik.....	26

2.2.1.4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik	27
2.3. Ketokohan Aktor Partai Sebagai Kekuatan Politik Partai	27
2.4. Modalitas.....	31
2.5. Teori Jaringan	33
2.6. Kerangka Berfikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Tipe Dan Jenis Penelitian.....	39
3.2. Lokasi Penelitian	39
3.3. Sumber Data	40
3.3.1. Data Primer	40
3.3.2. Data sekunder	41
3.4. Teknik Pengumpulan Data	41
3.4.1. Penelitian Pustaka.....	41
3.4.2. Wawancara	41
3.4.3. Penentuan Informan.....	42
3.4.4. Dokumentasi	42
3.5. Teknik Analisis Data.....	43
3.5.1. Reduksi Data.....	44
3.5.2. Data Display/Penyajian Data.....	44
3.5.3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi	44
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN.....	45
4.1. Sejarah Singkat Partai Golkar.....	45
4.1.1. Visi dan Misi Partai Golkar	48

4.1.1.1. Visi Partai Golkar.....	48
4.1.1.2. Misi Partai Golkar	48
4.1.1.3. Tujuan Partai Golkar	49
4.2. Gambaran Umum DPD II Partai Golkar Kabupaten Tana Toraja	49
4.3. Kondisi Sosial dan Politik Tana Toraja	51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
5.1. Aktor Sebagai Kekuatan Politik Partai	58
5.1.1. Ketokohan Aktor Partai Golkar	64
5.1.2. Modalitas Aktor.....	70
BAB VI PENUTUP.....	80
6.1. Kesimpulan.....	80
6.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

Gambar 2. Logo Partai Golkar

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Perolehan suara partai Golkar Sulawesi Selatan
- Tabel 2. Perolehan suara pada pemilu legislatif 2009 Tana Toraja
- Tabel 3. Perolehan suara pada pemilu legislatif 2014 Tana Toraja
- Tabel 4. Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif 2019
- Tabel 5. Perolehan Suara dan Kursi Setiap Pemilu Partai Golkar
- Tabel 6. Perolehan Suara Pemilu Partai Golkar Di Sulawesi Selatan
- Tabel 7. Perolehan Suara Pemilu Partai Golkar
- Tabel 8. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten
Tana Toraja Periode 2015-2020.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu proses para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.¹ Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang paling demokratis dalam sejarah politik di Indonesia.² Kemudian memasuki era pasca reformasi merupakan ujian bagi kedewasaan demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi langsung diambil sebagai pilihan dalam mengedepankan kemajuan politik dan partisipasi politik masyarakat. Walaupun demokrasi langsung terus memunculkan masalah baru dalam sistem politik selama ini, namun tetap saja dianggap sebagai pilihan yang terbaik sehingga masih berlaku sampai saat ini.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia telah melewati banyak rintangan sebagai negara yang demokrasi. Hal tersebut tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan politik

¹ Rumidan Rabi'ah, Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia. (Jakarta: Rajawali, 2009) hal 68.

² Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010) hal 67.

didalamnya. Salah satu kekuatan politik tersebut adalah partai politik. Partai politik biasanya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. Dalam perundang-undangan di Indonesia, partai politik diartikan sebagai suatu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.³

Dalam sistem demokrasi, pada umumnya yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu adalah partai politik. Partai politik merupakan hal yang sangat penting dikarenakan banyaknya fungsi-fungsi partai politik yang menyangkut pada kebutuhan masyarakat. Proses pemilu memiliki dampak yang begitu luas bagi berjalannya pemerintah atau masyarakat (yang diperintah). Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik lahir menjadi penghubung antara pernyataan kepentingan rakyat dan pemerintah. Partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.⁴ Sehingga pemilu tidak akan pernah lepas dari partai politik, karena salah satu fungsi pokok partai politik yaitu dapat menyalurkan aspirasi rakyat, dimana rakyat dapat ikut didalamnya dan berpengaruh kuat dalam pemilu. Perjalanan partai politik di Indonesia

³ Undang-Undang Partai Politik, 2002 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

⁴ Teuku May Rudi, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: Refika, 2003) hal 87.

terus berkembang hingga saat ini. Salah satu partai yang cukup lama dan lebih dahulu merasakan menjadi peserta pemilu di era orde baru adalah partai Golkar.

Golkar pertama kali terbentuk dengan nama Sekber Golkar (Sekretariat Bersama, Golongan Karya), yang didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira angkatan darat dengan menghimpun berbagai organisasi untuk ikut didalamnya. Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 yang lahir karena dorongan dari PKI beserta ormas-ormasnya dalam kehidupan politik komponen-komponen Sekber Golkar terdiri dari ABRI dan tiga organisasi massa yang disponsori ABRI, yaitu KOSGORO (Koperasi Serbaguna Gotong Royong), SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri), MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong).⁵

Dalam dunia demokrasi partai Golkar memiliki sejarah yang cukup gemilang dibandingkan dengan partai-partai lainnya. Bukan tanpa alasan partai Golkar pada masa orde baru memiliki kekuatan politik yang dominan dan menjadi mesin politik setia yang memerintah selama 32 tahun. Dengan begitu lamanya partai Golkar pernah berkuasa dan mengakar dimasyarakat sehingga partai ini memiliki jaringan politik yang begitu kuat secara nasional sampai kepada tingkat lokal. Tetapi seiring berjalannya waktu orde baru berlalu bersamaan dengan lengsernya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden karena desakan dari

⁵ Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1992) hal 14-16.

masyarakat yang resah dengan gaya kepemimpinannya maka kejayaan partai Golkar juga ikut menurun.

Perubahan yang sangat drastis terjadi kepada partai yang berlambangkan pohon beringin tersebut setelah masa peralihan dari orde baru ke reformasi. Memasuki pemilu legislatif pertama setelah reformasi tahun 1999 partai Golkar berada di urutan kedua dengan perolehan 23.742.112 suara dan perolehan dukungan 22,4 persen setelah PDIP yang memiliki perolehan suara 35,706.618 dan persentase perolehan dukungan 33,7 persen.⁶ Secara nasional pemilu legislatif tidak lagi dimenangkan oleh partai Golkar, sehingga dimenangkan oleh PDIP yang saat itu lebih dominan mendapat simpati dari masyarakat. Walaupun demikian, tetapi secara nasional partai Golkar dalam pemilu legislatif masih tetap kuat di beberapa daerah tertentu yang ada di Indonesia.

Pada pemilu legislatif 2004, partai Golkar merebut kembali posisinya sebagai pemenang pemilu legislatif dengan perolehan 24.480.757 suara, namun justru memiliki persentase dukungan suara yang menurun dari pemilu sebelumnya yaitu 21,6 persen dikarenakan bertambahnya partai baru.⁷ Sehingga suara masyarakat terbagi kepada partai yang baru mengikuti pemilu tersebut. Begitupun pemilu selanjutnya, pada pemilu legislatif 2009 dan 2014 secara nasional partai Golkar tidak lagi menjadi partai pemenang dalam pemilu legislatif.

⁶ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Kencana, 2010) hal 68.

⁷ Ibid, hal 70-71.

Perolehan suara partai Golkar secara nasional mengalami penurunan disetiap pemilihan umum legislatif dan tidak lagi mendominasi pada saat masa orde baru. Sulawesi Selatan merupakan salah satu penyumbang suara partai Golkar, akan tetapi mengalami dampak merosotnya kejayaan partai.

Tabel 1. Perolehan Suara Partai Golkar Sulawesi Selatan 2004-2019

No .	Pemilihan Umum	Perolehan Suara Partai Golkar
1.	2004	1.828.623
2.	2009	925.842
3.	2014	884.841
4.	2019	833.382

Sumber : Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan

Perolehan suara Partai Golkar semakin merosot, dalam artian Golkar bukan lagi satu-satunya kekuatan dominan. Menurut Gramsci Kemerosotan hegemoni terjadi pada saat kelompok yang dominan menghadapi tantangan berat yang dapat menyebabkan disintegrasi.⁸ Kemerosotan hegemoni Golkar secara nasional juga terjadi di daerah-daerah salah satunya Sulawesi Selatan. Kemerosotan perolehan suara partai Golkar tetap menjadi partai yang mendominasi. Sedikit banyak dinamika perpolitikan partai di daerah juga ikut berpengaruh pada akumulasi partai secara nasional.

Perolehan suara partai Golkar di Kabupaten Tana Toraja yang menunjukkan kondisi yang tetap membaik. Sejak reformasi, mulai dari

⁸ Nezar Patria dan Andi Arief (Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003) hlm. 128

pemilu legislatif 1999 sampai dengan pemilu legislatif 2019 selalu didominasi oleh Partai Golkar. Dominasi adalah sebuah paham untuk melakukan penaklukan atau penguasaan terhadap lainnya dalam hal ini bisa dilihat adanya penguasaan dari segi perolehan suara oleh Partai Golkar. Isitiah dominasi politik populer ketika dikembangkan oleh Partai Golkar di Indonesia untuk melambangkan dominasinya yang berdasarkan kuantitas dengan semboyan mayoritas pendamping yang mendekati kebesarannya.⁹ Dominasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penguasaan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lebih lemah baik itu dibidang politik, militer, olahraga, dan sebagainya.¹⁰ Dominasi Partai Golkar memang sudah dirasakan sejak dulunya hasil dari pemerintahan orde baru. Setelah reformasi dengan bermunculannya partai politik lain akan tetapi tidak mempengaruhi suara Partai Golkar. Dapat dilihat pada tabel dibawah perolehan suara partai Golkar di Kabupaten Tana Toraja.

Tabel 2. Perolehan suara pada pemilu legislatif 2009 Tana Toraja

NO	PARPOL	DAPIL TANA TORAJA				JUMLAH SUARASAH	PEROLEHAN KURSI
		1	2	3	4		
1	HANURA	707	0	0	0	707	1
2	PDIP	1.300	1.533	0	986	3.819	3
3	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	1.629	746	708	0	3.083	3

⁹ Bungaran Anton Simanjuntak, "Strategi Dominasi Dan Keutuhan Negara Bangsa Yang Pluralistik", *Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI*. Volume I No.2, Oktober 2005, hal. 58

¹⁰ Kbbi.web.id, "dominasi", diakses di <http://www.kbbi.web.id/dominasi>, pada 10 Mei 2021, pukul 23.17 WITA

4	GOLKAR	4.022	3.529	1.297	4.609	13.457	7
5	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	880	0	957	0	1.837	2
6	DEMOKRAT	835	1.183	2.213	1.074	5.305	4
7	PKPI	0	1.257	0	0	1.257	1
8	PKS	0	695	0	873	1.568	2
9	PAN	0	1.291	0	0	1.291	1
10	PARTAI PERSATUAN DAERAH	0	0	2.065	0	2.065	1
11	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	0	0	104	281	3850	2
12	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	0	0	0	1.122	1.122	1
13	PARTAI REPUBLIK NUSANTARA	0	0	0	459	459	1
	JUMLAH	9.373	10.234	7.344	9.404	36.355	30

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Tana Toraja 2009

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa partai Golkar masih mendominasi suara partai pada pemilihan legislatif 2009 dengan perolehan 13.457 suara dan berhasil meraih 7 kursi. Disusul partai Demokrat yang tertinggal jauh dari partai Golkar yang hanya memperoleh 5.305 suara. Partai Demokrat yang merupakan posisi kedua suara terbanyak, tetapi selisih suara antara partai Golkar dan partai Demokrat sebanyak 8.152 suara. Sehingga partai Golkar di Kabupaten Tana Toraja merupakan partai yang mempunyai kekuatan, popularitas, dan kedudukan yang tinggi karena tidak ada partai yang bisa menyainginya sebab perolehan suara yang diperolehnya.

Tabel 3. Perolehan suara pada pemilu legislatif 2014 Tana Toraja

NO	PARPOL	Dapil Tana Toraja					JUMLAH SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI
		1	2	3	4	5		
1	NASDEM	2.291	2.923	157	1.708	3.564	10.643	4
2	PKB	781	400	499	174	146	2000	0
3	PKS	959	2.675	1.985	403	65	6.087	2
4	PDIP	2.634	6.160	80	1.137	3.151	13.212	3
5	GOLKAR	7.975	8.590	2.330	3.201	5.464	27.560	7
6	GERINDRA	5.723	5.475	2.218	990	2.826	17.232	4
7	DEMOKRAT	5.928	6.829	2.977	1.538	2.042	19.314	3
8	PAN	847	1.388	532	919	340	4.026	0
9	PPP	42	420	6	6	110	584	0
10	HANURA	3.394	3.119	1.540	3.428	2.779	14.260	4
11	PBB	2	18	8	11	13	52	0
12	PKPI	1.602	2.707	457	1.541	2.880	9.187	3
JUMLAH		32.228	40.704	12.789	15.056	23.380	124.157	30

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Tana Toraja tahun 2014

Data tabel pemilihan legislatif pada pemilihan legislatif 2014 partai Golkar yang memperoleh suara tertinggi dengan perolehan 27.560 suara. Perolehan suara yang berhasil didapatkan oleh partai Golkar mempunyai hak untuk mendapatkan kursi terbanyak di Tana Toraja yaitu sebanyak 7 kursi. Keberhasilan dari partai Golkar yang menduduki posisi suara tertinggi merupakan suatu kekuatan dari partai yang mampu dipertahankan selama bertahun-tahun sejak era reformasi sampai sekarang.

**Tabel 4. Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif 2019
di Tana Toraja**

NO	PARPOL	DAPIL TANA TORAJA						JUMLAH SUARA SAH	PERO LEHAN KURSI
		1	2	3	4	5	6		
1	PKB	0	0	0	0	0	0	0	0
2	GERIND RA	1.750	1.978	1.583	2.270	1.562	1.149	10.292	2
3	PDIP	3.393	5.504	918	4.071	3.939	3.750	21.575	5
4	GOLKAR	3.407	7.977	3.798	2.751	3.149	5.809	26.891	7
5	NASDEM	3.388	2.637	2.291	2.949	4.419	3.461	19.145	6
6	GARUDA	1.036	382	116	985	383	1.110	4.012	0
7	BERKAR YA	1.712	2.032	115	213	319	775	5.166	1
8	PKS	1.129	1.303	1.927	4	7	8	4.378	0
9	PERIND O	5.206	1.918	30	1.294	1.680	179	10.307	1
10	PPP	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PSI	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PAN	3	258	26	10	7	3	307	0
13	HANURA	2.518	1.004	6	1.879	2.519	586	8.572	3
14	DEMOK RAT	2.357	905	3.037	1.759	2.401	2.731	13.190	4
15	PBB	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PKPI	4	3.293	4	1.132	1.862	724	7.019	1
JUMLAH		25.90	29.19	13.85	19.31	22.24	20.28	130.85	30
		3	0	1	7	7	5	4	

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Tana Toraja tahun 2019

Dari tabel tersebut terlihat perolehan suara partai Golkar dimana partai ini tetap mampu mempertahankan eksistensinya sebagai partai terkuat di DPRD Kabupaten Tana Toraja, hingga saat ini kembali memenangkan pemilu legislatif 2019 dengan perolehan kursi yang sama dengan pemilu legislatif sebelumnya yaitu sebanyak 7 kursi dari total 30

kursi yang ada di DPRD Tana Toraja. Meskipun dalam pemilu legislatif tahun ini partai Golkar memperoleh suara 26.891 suara sah yang berarti mengalami penurunan suara dari pemilu legislatif 2014 dengan selisi 669 suara.

Perolehan suara tertinggi kedua adalah partai Nasdem dengan perolehan 19.145 suara sah dan perolehan dimana hampir menyamai perolehan kursi partai Golkar yang hanya selisi satu kursi. Bukan tanpa alasan partai Nasdem memperoleh 6 kursi di DPRD karena melihat ada 6 dapil yang ada di Tana Toraja dan setiap dapil partai Nasdem mendapat 1 kursi di DPRD Tana Toraja. Letak keunggulan partai Golkar yaitu berada pada dapil 2, dimana ada dua kader Golkar yang mendapat suara tertinggi sehingga berhak mendapatkan 2 kursi di dapil tersebut.¹¹

Perolehan suara partai Golkar inilah yang kemudian menghantarnya kembali untuk meraih kursi terbanyak di DPRD dan berhak memperoleh posisi ketua DPRD Tana Toraja. Selain mendapatkan suara mayoritas dalam pemilu legislatif 2009, 2014 dan 2019 kemenangan partai Golkar di Kabupaten Tana Toraja juga diperkuat dengan kemenangan partai Golkar dalam memperebutkan posisi ketua DPRD Tana Toraja yang dijabat oleh Welem Sambolangi', S.E secara berturut-turut selama tiga periode.

Merujuk pada deskripsi diatas, dapat dilihat bahwa perolehan suara partai Golkar di Tana Toraja cenderung stabil dan semakin meningkat

¹¹ Situs Resmi KPU Kabupaten Tana Toraja (<https://kpu-tanatorajakab.go.id>) diakses 20 Agustus 2019.

meskipun, perolehan suara partai Golkar di Kabupaten lain di Sulawesi Selatan cenderung menurun. Reformasi telah membuka peluang kepada partai baru untuk ikut bersaing dengan partai yang telah mendominasi selama bertahun-tahun. Partai Golkar di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan angka penurunan pada pemilihan legislatif 2019 padahal partai Golkar merupakan suatu lembaga yang mempunyai peranan kuat ditengah masyarakat dan dikenali sampai ke pelosok-pelosok pedalaman di Tana Toraja. Berbagai kekuatan politik yang dimiliki partai Golkar untuk mendapatkan posisi atau *prastise* dalam masyarakat agar mudah untuk dimobilisasi suaranya untuk mewujudkan tujuan-tujuan partai.

Persaingan politik dari berbagai partai dan aktor politik menimbulkan berbagai dampak bagi partai Golkar yang berusaha mendapatkan simpati masyarakat dari berbagai aspek untuk mendapatkan posisi yang mendominasi. Komoditas politik yang dilakukan oleh aktor-aktor politik untuk mempengaruhi masyarakat dalam mewujudkan ambisi pribadi atau lembaga. Akan tetapi hal ini masih terus didominasi oleh partai Golkar dalam setiap pemilihan legislatif 2019.

Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian tentang kekuatan politik yang dimiliki oleh Partai Golkar dalam mempertahankan perolehan suaranya di Kabupaten Tana Toraja. Dengan judul penelitian **“KEKUATAN POLITIK PARTAI GOLKAR PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN TANA TORAJA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian yang dibangun oleh penulis adalah Bagaimana aktor partai Golkar dalam mempertahankan kekuatan politik pada pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Tana Toraja?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat aktor partai Golkar dalam mempertahankan kekuatan politik pada pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Tana Toraja. Dengan melihat kekuatan politik aktor partai Golkar dari ketokohan dan modalitas aktor dalam memenangkan pemilihan legislatif 2019 dan memperoleh suara terbanyak di kabupaten Tana Toraja.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademisi

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan studi lebih lanjut terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang politik
- b. Sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki arah permasalahan yang sama. Mengenai kekuatan politik pada pemilihan umum legislatif.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan wawasan untuk menambah pengetahuan serta informasi mengenai kekuatan politik partai Golkar pada pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Tana Toraja bagi seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan untuk masyarakat Tana Toraja pada khususnya.
- b. Sebagai sumber bacaan dan informasi mahasiswa dan dosen mengenai kekuatan politik pada pemilihan umum legislatif

1.4. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pustaka terlebih dahulu agar menjadi referensi untuk melakukan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. Meskipun masih sangat kurang penelitian tentang kekuatan partai politik pada pemilihan umum legislatif tetapi untuk menghindari kesamaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis mencari dan menemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal maupun skripsi yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas oleh penulis. Berikut ini beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian penulis:

1. Penelitian tentang kekuatan politik partai Golkar yang bersumber dari jurnal Universitas Hasanuddin tahun 2016, ditulis oleh Gustiana Kambo dengan judul "Kekuatan Partai Golkar di Toraja Utara."

Penelitian tersebut menggambarkan wujud kekuatan yang dimiliki partai Golkar di Kabupaten Toraja Utara dalam membangun kepercayaannya pada masyarakat. Sehingga dalam penelitian tersebut ditemukan wujud kekuatan partai Golkar di Toraja Utara dalam membangun kepercayaannya dalam masyarakat yaitu dengan cara menunjukkan kemampuannya dalam mengelola institusi secara optimal dengan mengakar pada kepentingan konstituennya.

2. Dalam penelitian sebelumnya, terdapat juga skripsi yang mengkaji tentang “Eksistensi partai Golkar dalam politik lokal: studi kasus dewan pimpinan daerah Partai Golkar Kabupaten Simalungan tahun 2004-2009”, ditulis oleh Khairunnisa Lubis mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Jakarta (2014). Dalam penelitian tersebut mengkaji tentang strategi partai Golkar mempertahankan kemenangan dalam perolehan suara pada pemilu legislatif. Kemudian dalam penelitian tersebut ditemukan dua faktor yakni strategi pemenangan pemilu yang efektif dan terorganisir sampai ke level akar rumput. Serta visi, misi dan implementasi program kerja yang berbasis pada pembangunan baik infrastruktur, ekonomi dan pariwisata maupun pendidikan. Sehingga elektabilitas partai Golkar di tingkat legislatif di Kabupaten Simalungan cenderung stabil dan meningkat.

3. Kemudian penelitian sebelumnya yaitu skripsi dengan judul “Dominasi Partai Golkar di Kabupaten Bone Pasca Reformasi” yang ditulis oleh Muh Qadri, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2018). Penelitian tersebut mengkaji tentang hegemoni kekuasaan dan kekuatan partai Golkar di Kabupaten Bone pasca reformasi yang semakin kuat baik dalam legislatif maupun eksekutif (pemerintahan).

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan yang signifikan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai kekuatan politik partai Golkar pada pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Tana Toraja. Kemenangan partai Golkar merupakan kekuatan politik partai yang memanfaatkan fungsi partai yang secara maksimal. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengkaji kekuatan politik aktor partai Golkar dalam mempertahankan kekuatan politik pada pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Tana Toraja. Dengan melihat ketokohan dan modalitas aktor partai Golkar dalam memenangkan pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Tana Toraja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kekuatan Politik

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata dari kekuatan berasal dari kata aslinya yakni banyak tenaga, daya, keras, usaha, dan mempunyai keunggulan. Sehingga kekuatan diartikan sebagai tingkat kesatuan yang diinginkan.¹² Walaupun kekuatan dan kekuasaan sering dipakai dalam arti yang sama, namun sebagian besar analis menganggap kekuasaan sebagai konsepsi yang lebih luas dan melihat kekuatan sebagai suatu bentuk kekuasaan yang lebih dalam dengan berbagai aspek yang mendukungnya.

Politik berarti siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang; kekuasaan dan pemegang kekuasaan; pengaruh; tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Dari semua pandangan yang beragam itu ada persesuaian umum bahwa politik mencakup sesuatu yang dilakukan orang, politik adalah kegiatan.

Berdasarkan pengertian di atas maka, politik pada hakekatnya *the art and science of government* atau seni dan ilmu memerintah. Sedangkan pengertian politik menurut Miriam Budiardjo adalah segala aktivitas yang dilakukan dalam suatu sistem politik atau negara yang berkaitan dengan proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu, disamping bagaimana

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. Balai Pustaka.

cara mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.¹³ Dalam hal ini, politik dapat diartikan sebagai aktifitas-aktifitas atau kegiatan-kegiatan. Satu ungkapan populer menyatakan *Everything is political* (Tiap-tiap tindakan adalah sifatnya politis) menunjukkan makna tersebut. Tetapi pernyataan ini, tidak memberikan batasan pengertian mana tindakan politik, dan mana yang bukan tindakan politik.

Dalam suatu tindakan yang sifatnya politis maka harus mencakup proses, dimana sekelompok manusia menggunakan kekuatan atas orang lain atau berusaha agar ideologinya berlaku pula atas orang lain itu. Selain itu ada pula ungkapan menyatakan bahwa politik adalah perjuangan mengangkat penguasa yang berfungsi menetapkan kebijaksanaan pemerintah. Walaupun arti ini telah menunjukkan arti yang berbeda antara aktifitas politik dan nonpolitik, tetapi belum menyentuh sasaran secara tuntas kegiatan-kegiatan yang non-pemerintah.

Tingkat kesatuan politik yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat pada hakikatnya mencerminkan kaitan antara lembaga politik dan kekuatan-kekuatan sosial yang membentuknya. Kekuatan sosial adalah kelompok etnis, keagamaan, tentorial, ekonomis atau status. Pada dasarnya modernisasi melibatkan peningkatan jumlah dan penganekaragaman kekuatan sosial di dalam masyarakat. Tetapi suatu organisasi politik ialah suatu sarana peraturan untuk mempertahankan

¹³ Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta, PT Gramedia. 2002) hal 3.

kekuasaan, menyelesaikan perselisihan memilih tokoh-tokoh pimpinan yang memiliki wibawa.

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa yang diartikan dengan kekuatan-kekuatan politik adalah bisa masuk dalam pengertian individual maupun dalam pengertian kelembagaan.¹⁴ Dalam pengertian yang bersifat individual, kekuatan-kekuatan politik tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Orang-orang ini terdiri dari pribadi-pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambilam keputusan politik.

Secara kelembagaan kekuatan politik sebagai lembaga atau organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sistem politik. Kekuatan Politik adalah segala sumber daya politik yang digunakan seseorang untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Fungsi Kekuatan Politik yaitu:¹⁵

- Mempengaruhi kebijakan mulai dari proses pembuatan sampai jalannya kebijakan tersebut.
- Keseimbangan kekuatan.
- Agregator dan artikulator kepentingan pendekatan analisa kekuatan politik. Struktural pendekatan yang melihat peran dan fungsi seseorang atau masyarakat dalam sebuah struktur/sistem.

¹⁴ Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia, 2003) Hlm. 52

¹⁵ Halking dan Budi Ali Mukmin..*Op. cit.*, hlm.173.

Kekuatan politik dibagi menjadi dua sub bagian besar, yakni kekuatan politik formal dan kekuatan politik non-formal.¹⁶ Aspek potensial tertransformasikan menjadi kekuatan politik sebagaimana yang dikatakan Effendy Bahtiar yaitu:

1. kekuatan-kekuatan politik yang formal mengambil bentuk kedalam partai-partai dan militer.
2. Kekuatan politik yang non-formal adalah merupakan bagian dari bangunan *civil society*, dalam hal ini dapat dimasukkan: dunia usaha, kelompok professional dan kelas menengah, pemimpin agama, kalangan cerdik (intelektual, lembaga-lembaga, pranata-pranata masyarakat), dan media massa.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan akan arti dari kekuatan-kekuatan politik adalah suatu komunitas atau kelompok (organisasi) baik secara formal maupun non-formal yang mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik.

2.2. Partai Politik Sebagai Kekuatan Politik

Partai politik merupakan sekumpulan individu yang secara terstruktur membentuk sebuah lembaga yang bertujuan merebut kekuasaan politik secara sah (institusionalisasi penggunaan hak suara yang berjalan secara teratur). Melalui kekuasaan yang diraihnya, orang-orang yang berada dalam partai politik tersebut, akhirnya bisa

¹⁶ Effendy, Bahtiar. Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia (Jakarta: 1998) hal 197

menjalankan program-program partai politik. Sama halnya sebuah organisasi pada umumnya partai politik juga mempunyai asas, tujuan, ideologi, dan misi tertentu yang diterjemahkan ke dalam program-program partai politik. Dimana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Partai politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat.

Carl J. Fiedrich mendefinisikan partai politik sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini kemanfaatan yang bersifat idiiil maupun materil kepada anggotanya. Sedangkan menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan.¹⁷ Menurut Ichlasul Amal partai politik merupakan satu keharusan dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis.¹⁸ Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta

¹⁷ <http://Id.Wikipedia.Org/Politik> diakses pada tanggal 27 Agustus 2019.

¹⁸ Ichlasul Amal, Teori-Teori Mutahir Partai (Tiara Wacana: Yogyakarta, 1998) hal 11.

menyediakan sarana sukses kepemimpinan secara absah (*legitimate*) dan damai.

Namun yang jelas tujuan keberadaan partai politik adalah sebagai kendaraan mencapai kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan menurut Robert M. Maclver adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan cara memberi perintah, maupun tidak langsung dengan menggunakan segala alat atau cara yang tersedia.¹⁹

Dengan demikian kekuasaan yang ada pada partai politik adalah sumber kekuatan politik yang dimiliki partai politik agar dapat mengendalikan roda pemerintahan secara langsung dengan menggunakan alat dan cara yang tersedia. Dalam hal ini adalah dukungan dari pemilih sebagai basis legitimasi atau jaminan menjalankan kekuasaan. Kuat atau lemahnya kekuasaan partai politik tersebut sebagai kekuatan politik sangat bergantung pada jumlah dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada partai politik. Suara-suara para pemilih menjadi faktor pendorong terselenggaranya kebijakan-kebijakan bagi yang berkuasa.

Namun sumber kekuatan partai politik tidak hanya terletak pada jumlah suara pemilih tetapi masih banyak lagi alat kekuasaan sebagai posisi tawaran yang dimiliki partai politik untuk mempengaruhi orang lain dan mendapatkan kekuasaan agar kekuatan politiknya lebih kuat dan stabil. Misalnya pertama, kekayaan seorang politikus yang memiliki

¹⁹ Muhtar Haboddin (ebook), Memahami Kekuasaan Politik (Malang: UB Press) hal 6.

sumber-sumber kekayaan, uang, tanah, perusahaan, media. Kedua, relasi atau jaringan sosial akan lebih mudah mendapatkan dukungan untuk mendukung partai politiknya berkuasa. Apalagi bagi negara yang sudah maju, didukung sumber daya manusia yang memadai. Kebebasan bersaing bagi partai politik dengan kompetitornya hanya ada di negara yang menganut sistem politik demokrasi.

Dalam mewujudkan kekuatan itu, partai politik diisi dengan kader-kader yang militan dan struktur organisasi yang hirarki ketat dipandang sebagai sarana yang tangguh. Selain itu organisasi yang bernaung dibawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat dan menekankan perpaduan dari kepentingan partai dengan kepentingan secara menyeluruh. Dapat dilihat bahwasannya partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak eksekutif. Jadi yang dimaksudkan partai sebagai kekuatan politik lebih berfungsi untuk mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik dan juga berperan untuk memaksa individu agar menyesuaikan diri dengan suatu cara hidup yang sejalan dengan kepentingan partai. Untuk bisa menjalankan itu dibutuhkan sebuah indoktrinasi dan juga melalui propaganda dari atas ke bawah.

Sebaliknya jika partai sebagai kekuatan politik di negara demokrasi hal itu sangat berbeda jauh dengan partai dalam negara otoriter. Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya, yakni menjadi wahana bagi negara untuk berpartisipasi dalam

pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya dihadapan penguasa. Di negara demokrasi cara yang digunakan partai politik untuk mendapatkan dan memperhatakan kekuasaan yaitu dengan ikut serta dalam pemilihan umum.

Apabila kekuasaan memerintah telah diperoleh, partai politik itu berperan pula sebagai pembuat keputusan politik. Sedangkan pada partai politik yang tidak mencapai mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat akan berperan sebagai pengontrol terhadap partai mayoritas atau berada dalam partai oposisi. Dari pernyataan diatas bahwasannya partai sebagai kekuatan politik dinegara demokrasi tidak hanya menguasai pemerintahan dan mengendalikan masyarakat seperti penjelasan didalam partai yang berada pada negara otoriter, melainkan partai yang menjadi oposisi juga bisa disebut dengan kekuatan politik apabila partai politik itu mempunyai pengaruh dalam jalannya pemerintahan. Hal ini juga didukung dengan sistem kepartain yang biasanya ada sebuah kompetisi dalam memperebutkan kekuasaan, yang dimaksudkan partai sebagai kekuatan politik juga memiliki pengaruh terhadap jalannya pemerintahan dia bisa juga mengawasi keputusan kebijakan apakah itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam memasarkan produk partai politik ke masyarakat Nifferengger membaginya dalam tiga kategori (1) *party platform* atau Platform Partai, (2) *past record* atau catatan tentang hal-hal yang dilakukan dimasa lampau, (3) *personal characteristic* atau ciri pribadi.

Party platform bisa berupa kegiatan yang dilakukan di lapisan masyarakat yang tujuannya untuk menjaga nama baik sebuah partai politik, kegiatan bisa berupa kegiatan yang sifatnya membantu masyarakat kelas bawah sampai menengah dengan membagikan bantuan. *Past record* mengungkapkan apa yang terjadi dimasa lalu sebuah partai. *Personal Characteristic* yang memungkinkan timbul dari karakteristik calon dalam pemilihan legislatif. Masyarakat sangat menghargai lembaga atau partai yang dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhannya.

Sehingga perspektif publik terhadap citra lembaga, sangat ditentukan oleh kegunaan lembaga itu bagi masyarakat. Makin tinggi kegunaan lembaga atau partai politik bagi masyarakat, maka lembaga atau partai tersebut akan semakin diperluhkan oleh masyarakat.²⁰ Dengan demikian upaya memperbesar dan mempercantik lembaga atau partai harus diusahakan. Para politikus atau aktor partai harus memperbesar partai politiknya melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Untuk itu harus menampilkan partai politik melalui ketokohan para pengurusnya dan aktivitasnya sehari-hari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Eksistensi partai politik tidak terlepas dari tiga pihak, diantaranya:²¹

1. Anggota/kader partai yang jumlahnya lebih besar kader yang loyal terhadap partai politik tentu sangat diperlukan, mengingat

²⁰ Dalam jurnal "*Kajian Teori*" diakses dari <https://eprints.uny.ac.id/2381/4/4.%20BAB%2011.pdf> (19 Agustus 2019)

²¹ A Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*(Yogyakarta,Graha Ilmu, 2007),43

kebanyakan keanggotaan partai bersifat normatif dan tingkat kesetiaan terhadap partai tidak benar-benar mengakar.

2. *The professional workers*, merupakan pengurus dalam organisasi partai.
3. Kelompok elite partai yang mempunyai wewenang dan dapat menentukan garis kebijakan partai.

2.2.1. Fungsi Partai Politik

2.2.1.1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat ke pemerintah.²² Partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang memerintah dengan yang diperintah. Semua pendapat dan aspirasi digabungkan serta diolah dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan. Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan kedalam program atau *platform* partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum.²³

2.2.1.2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum dan nilainya akan lebih

²² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992) hal 119.

²³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008) hal 406.

tinggi apabila mampu mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara serta menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.²⁴ Melalui proses sosialisasi inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

2.2.1.3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik yakni seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon kader. Gabriel Almond mengungkapkan bahwa fungsi rekrutmen adalah seleksi masyarakat dalam kegiatan politik guna memenuhi jabatan pemerintahan melalui citra dalam media, menjadi anggota partai, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.²⁵

Rekrutmen politik memiliki pola. Pola-pola yang ada dalam rekrutmen politik memiliki sistem nilai, basis dan stratifikasi sosial yang ada. Rekrutmen politik memiliki sifat khusus didalamnya, contoh untuk perekrutan tempat-tempat tertentu harus berdasarkan hubungan

²⁴ *Ibid*, hal 408.

²⁵ Mas'ood, "*Perbandingan Sistem Politik*" (Yogyakarta: Gadjaja Mada University Press. 1993) hal 29.

kedekatan, dalam arti kedekatan seseorang menjadi acuan untuk menempati posisi tersebut.²⁶

2.2.1.4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Dalam masyarakat yang sifatnya heterogen, yang terdiri dari berbagai macam etnis, sosial ekonomi maupun agama, akan terdapat celah untuk menimbulkan konflik. Disini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasi atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatif yang ditimbulkan dari konflik tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.²⁷

2.3. Ketokohan Aktor Partai Sebagai Kekuatan Politik Partai

Aktor berasal dari bahasa latin *agere*, yang berarti berbuat atau melakukan. orang yang menumbuhkan, orang yang meletakkan dasar, perintis, pencipta, pengarang. *Auctor* merupakan asal-usul untuk kata Inggris *author* yang kita kenal dalam arti pengarang atau penulis. Aktor mempunyai arti lebih luas pembuat atau pelaku. Aktor politik berarti pelaku yang mempunyai kekuasaan dalam sistem politik. Aktor juga mencakup individu pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik.

Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan kekuasaan dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk memengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai

²⁶ Rudi Saputra dalam skripsinya "Rekrutmen Partai Politik" (Jakarta: Universitas Hidayatullah, 2018) hal 25.

²⁷ *Ibid*, hal 409.

kekuasaan.²⁸ Kemudian Robert A. Dahlan melanjutkan Laswell dan Kaplan dengan menyatakan bahwa konsep kekuasaan merujuk pada adanya kemampuan untuk memengaruhi dari seseorang kepada orang lain.²⁹ Orang yang biasanya mampu memengaruhi orang lain adalah orang yang memiliki pengaruh dalam sebuah sistem politik seperti elit politik atau aktor politik. Aktor mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan. Sementara menurut Henri Comte Dasar fundamental dari pendekatan aktor adalah masyarakat dianggap sebagai suatu piramida dimana yang duduk dipuncaknya disebut aktor politik. Kelompok aktor adalah suatu fenomena yang abadi akan selalu lahir dan tidak mungkin tidak ada dalam suatu masyarakat. Sedangkan menurut Gaetano Mosca, aktor merupakan kelompok kecil dari warga negara yang berkuasa dalam sistem politik. Penguasa ini memiliki kewenangan yang luas untuk mendinamiskan struktur dan fungsi sebuah sistem politik. Secara operasional para aktor atau penguasa mendominasi segi kehidupan dalam sistem politik. Penentuan kebijakan sangat ditentukan oleh kelompok aktor politik.

Dalam mengidentifikasi siapa yang termasuk dalam kategori aktor politik, maka terdapat tiga metode yakni:³⁰

²⁸ Haryanto, Elit (ebook) , Massa dan Kekuasaan: Suatu Bahan Pengantar (Yogyakarta: PolGov, 2017) hal 46.

²⁹ *Ibid*, hal 47.

³⁰ <http://biarhappy.wordpress.com/2011/04/11/teori-elite-politik/diakses> pada tanggal 12 Agustus 2019

1. Metode posisi, aktor politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam sistem politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama organisasi politik. Aktor ini mencakup para pemegang jabatan tinggi.
2. Metode reputasi, aktor politik ditentukan berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
3. Metode pengaruh atau keputusan, aktor politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elit politik.

Letser G. Seligman mengemukakan bahwa proses pengangkatan aktor-aktor politik akan berkaitan dengan beberapa aspek seperti: (1) masalah kekuasaan, (2) legitimasi elit politik, (3) representativitas elit politik, (4) korelasi antara pengangkatan aktor-aktor politik dengan perubahan politik.

Aktor politik selalu ada dalam sebuah partai politik, karena partai politik yang kemudian akan melahirkan kader-kader atau calon aktor politik yang kemudian akan berkecimpung dalam dunia politik. Peranan aktor politik sangat penting untuk menghimpun kekuatan politik suatu

partai, karena biasanya sosok seorang tokoh politik yang sudah tergambar bagus citranya dimasyarakat cenderung akan mudah dimobilisasi oleh seorang aktor politik. Begitu halnya ketika seorang aktor politik suatu partai politik terjerat suatu kasus yang kemudian akan memperburuk citranya dimata masyarakat, maka secara tidak langsung hal itu juga akan berdampak kepada partai politik. Artinya seorang aktor politik merupakan kunci keberhasilan atau malah menjadi awal penyebab keterpurukan sebuah partai politik.

Aktor politik tidak akan lepas dari citra atau pribadi mereka dimata khalayak umum karena sebagai aktor politik mereka mempunyai peran yang sangat vital dalam partai. Pencitraan politik adalah penggambaran panjang yang mengikut sertakan nilai-nilai partai politik suatu aktor sebagai pemberi solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran seorang tokoh dalam proses pemilu selalu dibutuhkan, dalam hal ini secara khusus untuk mempengaruhi pemilih. Pada pemilu legislatif, ketokohan pemimpin partai dan calon anggota legislatif memiliki potensi dalam mempengaruhi pemilih untuk memutuskan apakah memilih partai atau calon dari partai tokoh yang bersangkutan. Menurut Rakhmat ketokohan adalah orang yang memiliki kredibilitas, daya tarik, dan kekuasaan. Dimana Aristoteles menyebutnya sebagai ethos dengan kata lain ketokohan sama dengan ethos, yaitu gabungan antara kredibilitas, atraksi dan kekuasaan. Menurut Nimmo orang yang memiliki ketokohan dapat juga disebut sebagai pahlawan. Oleh karena itu, partai politik harus

menampilkan program dan tokoh-tokoh yang menarik, disukai dan didukung oleh rakyat.³¹

2.4. Modalitas

Dalam setiap pelaksanaan kontestasi politik, modal merupakan suatu prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap kandidat untuk memenangkan proses politik elektoral, oleh karena itu hadirnya modalitas berperan penting sebagai pendukung aktor maupun partai politik untuk maju dalam kontestasi politik. Pendekatan modalitas sendiri merupakan sebuah model kemenangan kompetisi elektoral dengan berbasiskan pada modalitas yang dimiliki oleh kandidat atau peserta kontestasi. Secara umum, modalitas ini terdiri atas tiga bagian besar yaitu modal politik (*politik capital*), modal sosial (*social capital*) dan modal ekonomi (*economic capital*). Dalam ilmu politik, ketiga modalitas ini merupakan fundamental yang dapat dikembangkan oleh setiap kandidat untuk maju dan bertarung dalam sebuah kontestasi politik.³² Dalam setiap penyelenggaraan kontestasi politik, bukan rahasia lagi jika membutuhkan modal bagi setiap kandidat baik individu atau partai politik. Dukungan modalitas dalam kontestasi politik merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh partai agar berhasil memenangkan kontestasi politik khususnya dalam pemilihan umum legislatif.

Ahli politik J.A. Booth dan P.B. Richard mengartikan modal politik sebagai aktifitas warga negara untuk mencapai kekuasaan dan

³¹ Anwar Arifin, *Pencitraan Dalam Politik* (Jakarta: Pustaka Indonesia, 2006), 41

³² Dalo, 2010:1

demokrasi. Modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan atau sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Modal ekonomi partai. Modal Sosial adalah berkaitan dengan bangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh calon legislatif dengan masyarakat yang memilihnya. Termasuk didalamnya adalah sejauh mana calon legislatif itu mampu meyakinkan para pemilih bahwa mereka itu memiliki kompetensi untuk memimpin daerahnya dan memiliki integritas yang baik. Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai penggerak dan pelumas mesin politik yang dipakai. Modalitas ekonomi sangat diperlukan untuk membiayai semua tahap-tahap dalam pemilu. Dalam menjalankan partai politik sebagai organisasi dengan aktivitas politik yang luas memerlukan dukungan dana yang cukup. Tanpa dukungan dana yang memadai, sulit diharapkan partai politik untuk dapat melaksanakan fungsinya secara efektif.

Finansial atau keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai berupa uang atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggungjawab partai politik.³³ Selanjutnya modal itu juga ada yang secara langsung dipakai untuk mempengaruhi pemilih.³⁴ Modal ekonomi berasal dari dukungan dana politik baik itu berdasarkan sumbernya dari dana pribadi donator, dan berdasarkan penggunaannya untuk memenangkan pemilu legislatif.

³³ Pasal 1 angka 5 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

³⁴ Kacung Marijan. 2010.

Modal ekonomi ini biasanya tersimpul dalam seberapa besar jumlah uang atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah kelompok misalnya sebuah organisasi atau perusahaan.

Modal ekonomi partai politik memainkan peranan cukup besar bagi keberlangsungan kegiatan operasional partai politik. Layaknya sebuah organisasi yang menjadi kendaraan politik calon pejabat, modal ekonomi diibaratkan seperti darah yang harus terus mengalir guna menyambung kehidupan partai politik. Mengingat biaya yang dikeluarkan cukup besar bagi operasional maupun infrastruktur partai politik, tidak heran jika partai politik harus memanfaatkan sumber-sumber pendanaan yang cukup. Ada tiga sumber dana yang diterima partai politik sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang No 2 Tahun 2011 pasal 34 yaitu; APBD, iuran anggota atau kader dan dana pihak ketiga.³⁵

2.5. Teori Jaringan

Pakar teori jaringan menggambarkan pendekatan normatif yang memusatkan perhatian terhadap kultur dan proses sosialisasi yang menanamkan (*internalization*) norma dan nilai ke dalam diri aktor. William mengungkapkan pandangan analisis jaringan mempelajari keteraturan individu dan kolektivitas berperilaku ketimbang keteraturan keyakinan tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Setelah menjelaskan apa yang bukan menjadi sasaran perhatiannya, teori jaringan lalu menjelaskan sasaran perhatian utamanya, yakni pola objektif ikatan yang

³⁵ Pasal 1 angka 5 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

menghubungkan anggota masyarakat (individual dan kolektifitas). Wellman mengungkapkan sasaran perhatian utama teori jaringan sebagai berikut :

*“Analisis jaringan dimulai dengan gagasan sederhana namun sangat kuat, bahwa usaha utama sosiolog adalah mempelajari struktur sosial. Cara paling langsung mempelajari struktur sosial adalah menganalisis pola ikatan yang menghubungkan anggotanya. Pakar analisis jaringan menelusuri struktur bagian yang berada dibawah pola jaringan biasa yang sering muncul ke permukaan sebagai sistem sosial yang kompleks. Aktor dan perilakunya dipandang sebagai dipaksa oleh struktur sosial ini. Jadi, sasaran perhatian analisis jaringan bukan pada aktor sukarela, tetapi pada paksaan structural”.*³⁶

Satu ciri khas teori jaringan adalah pemusatan perhatiannya pada struktur mikro hingga makro. Artinya, bagi teori jaringan, aktor mungkin saja individu tetapi mungkin pula kelompok, perusahaan dan masyarakat. Hubungan dapat terjadi di tingkat struktur sosial skala luas maupun di tingkat yang lebih mikroskopik. Granoveter melukiskan hubungan di tingkat mikro itu seperti tindakan yang “melekat” dalam hubungan pribadi konkret dan dalam struktur (jaringan) hubungan itu. Hubungan ini berlandaskan gagasan bahwa setiap aktor (individu atau kolektifitas)

³⁶ Antonius Purwanto. Peranan Jaringan Sosial dalam Klaster Industri. <https://media.neliti.com/media/publications/98037-ID-peranan-jaringan-sosial-dalam-klaster-in.pdf>. Diakses pada 20 Agustus 2019.

mempunyai akses yang berbeda terhadap sumber daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan, informasi). Akibatnya adalah bahwa sistem yang terstruktur cenderung terstratifikasi, komponen tertentu tergantung pada komponen yang lain.

Aspek penting analisis jaringan adalah bahwa analisis ini menjauhkan sosiolog dari studi tentang kelompok dan kategori sosial dan mengarahkannya untuk mempelajari ikatan di kalangan dan antar aktor yang “tak terikat secara kuat dan tak sepenuhnya memenuhi persyaratan kelompok”. Contoh yang baik dari ikatan seperti ini telah diungkapkan dalam karya Granoveter tentang “ikatan yang kuat dan lemah”. Granoveter membedakan antara ikatan yang kuat, misalnya hubungan antara seseorang dan teman karibnya, dan ikatan yang lemah, misalnya hubungan antara seseorang dan kenalannya.

Sosiolog cenderung memusatkan perhatian pada orang yang mempunyai ikatan yang kuat atau kelompok sosial. Mereka cenderung menganggap ikatan yang kuat itu penting, sedangkan ikatan yang lemah dianggap tak penting untuk dijadikan sasaran studi sosiologi. Granoveter menjelaskan ikatan yang lemah dapat menjadi sangat penting. Contoh, ikatan lemah antara dua aktor dapat membantu sebagai jembatan antara dua kelompok yang kuat ikatan internalnya. Tanpa adanya ikatan yang lemah seperti itu, kedua kelompok mungkin akan terisolasi secara total. Isolasi ini selanjutnya dapat menyebabkan sistem sosial semakin terfragmentasi.

Seorang individu tanpa ikatan lemah akan merasa dirinya terisolasi dalam sebuah kelompok yang ikatannya sangat kuat dan akan kekurangan informasi tentang apa yang terjadi di kelompok lain maupun dalam masyarakat lebih luas, karena itu ikatan yang lemah mencegah isolasi dan memungkinkan individu mengintegrasikan dirinya dengan lebih baik ke dalam masyarakat lebih luas. Meski Granoveter menekankan pentingnya ikatan yang lemah, Ia segera menjelaskan bahwa, “ikatan yang kuat pun mempunyai nilai”. Misalnya, orang yang mempunyai ikatan kuat memiliki motivasi lebih besar untuk saling membantu dan lebih cepat untuk saling memberikan bantuan.

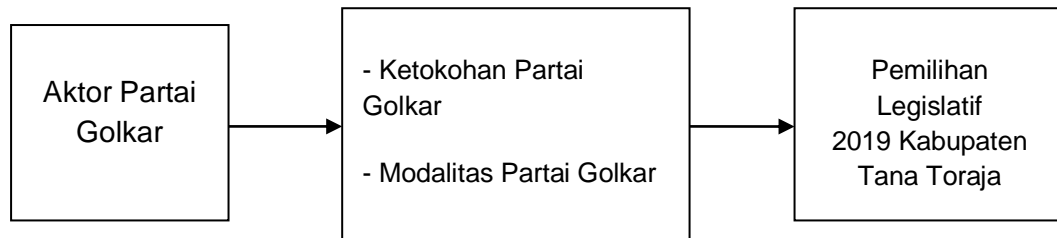
2.6. Kerangka Berfikir

Dalam proses demokrasi aspirasi rakyat disalurkan melalui mekanisme pemilu untuk memilih wakilnya di DPRD. Partai Politik dipandang sebagai sebuah lembaga yang formal yang memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Partai politik dijadikan kendaraan politik guna menampung aspirasi rakyat. Pada pemilu legislatif 2019 yang berlangsung tanggal 17 April 2019 yang memunculkan berbagai partai politik dengan masing-masing mempunyai kekuatan politik tersendiri dan berharap bisa memenangkan pemilihan legislatif 2019. Penulis membahas kerangka pikir tentang kekuatan politik yang dimiliki oleh partai Golkar pada pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Tana Toraja.

Penelitian ini melihat tentang partai Golkar ditingkat lokal, yang dalam penelitian ini difokuskan untuk melihat kekuatan partai Golkar pada pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Tana Toraja. Dengan melihat pada pemilu legislatif sebelumnya sejak reformasi yaitu pemilihan legislatif pada 2009 dan 2014 Partai Golkar selalu sukses dalam memenangkan pemilu dengan posisi bertahan sebagai partai terkuat serta memperoleh kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Tana Toraja. Ditambah dengan kemenangannya dipemilihan legislatif 2019 membuktikan kekuatan Partai Golkar diparlemen Kabupaten Tana Toraja semakin kuat. Meskipun partai Golkar memiliki pesaing dari partai Nasdem yang hampir menyamai kedudukannya di DPRD Tana Toraja tetapi dalam hal perolehan suara partai yang berlambangkan pohon beringin ini tetap memiliki perolehan suara yang jauh lebih tinggi dari partai Nasdem dalam pemilu legislatif, sehingga berhasil merebut kursi ketua DPRD Tana Toraja secara berturut-turut selama 3 periode yang dijabat oleh Welem Sambolangi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan politik aktor partai Golkar dengan melihat ketokohan dan modalitas dalam memperoleh suara terbanyak di Kabupaten Tana Toraja dan berhasil memperoleh kursi terbanyak diparlemen sehingga memenangkan pemilihan legislatif secara berturut-turut.

2.7. Skema Kerangka Pikir



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir